

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN AJARAN 2013-2014 PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 002 DI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

Yuyun Sefri Setyaningrum¹

Abstrak

Yuyun Sefri Setyaningrum, 2016, Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2013-2014 Pada Sekolah Dasar Negeri 002 Di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Daryono, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan untuk mengetahui Faktor penghambat implementasi program bantuan operasional sekolah tahun ajaran 2013-2014 pada sekolah dasar negeri 002 di kecamatan bontang selatan kota bontang.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Program BOS: yang meliputi Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan faktor penghambat program BOS. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas Key Informan yaitu Kepala Sekolah SDN 002 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan informan penelitian yakni bendahara BOS SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan orang tua murid atau masyarakat yang diperoleh melalui metode Purposive Sampling. Data dikumpulkan melalui, kepustakaan, observasi, wawancara dan penelitian lapangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa program BOS di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan bantuan dana BOS guna untuk membantu bagi murid-murid yang kurang mampu dan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, meskipun pelaksanaannya belum mencapai 100% karena belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk faktor penghambatnya yakni, masih kurangnya sarana dan prasarana di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana salah satu alokasi dana dari program BOS adalah untuk membangun fasilitas berupa sarana dan prasarana di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Program BOS, Bontang Selatan*

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Email: yuyunhawhaw@yahoo.com

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia dan juga keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban mencerdaskan masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu tujuan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pada pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam Ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Pemerintah dalam mencapai tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka dilakukan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005, APK tingkat SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 sebesar 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 9 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar pada tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun paling lambat pada tahun 2015 yang akan datang.

Pada bulan Juli tahun 2005 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai Program Bantuan Operasional Sekolah yang telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun, tujuan dari Program Bantuan Operasional Sekolah selain untuk mencapai target dan mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga harus berkontribusi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Untuk mencapai tujuannya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat mensukseskan dan menjalankan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah Kota Bontang dan Dinas Pendidikan Kota Bontang juga ikut serta dalam mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun melalui Program Bantuan Operasional Sekolah. Dengan adanya program BOS maka akan mengurangi tingkat anak-anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan masalah biaya pendidikan yang mahal terutama bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan program BOS oleh pemerintah ditunjukkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang lainnya. Fasilitas pendidikan merupakan sarana penting untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula. Penyaluran BOS yang pengaturannya di serahkan kepada masing-masing daerah di upayakan agar lebih mengenai target yang membutuhkan. Untuk mengawasi penyaluran BOS, mulai pendataan hingga penyalurannya, telah disiapkan beberapa tim pengawas agar benar-benar mengena dan efisien.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan program BOS harus kerjasama dengan baik antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kab/Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi dalam proses pelaksanaan program BOS sehingga pihak sekolah dapat bekerja dengan maksimal dan pihak sekolah tidak mengalami hambatan melaksanakan kegiatan belajar mengajar disekolah. Selain itu dibutuhkan pula kesadaran para orang tua dalam penggunaan dana BOS secara efisien dan digunakan untuk keperluan sekolah.

Pada kenyataannya pelaksanaan program dana BOS sering kali terjadi masalah yang membuat program ini tidak berjalan dengan efektif, pencairan dana BOS yang seharusnya triwulan pertama yaitu Januari-Maret dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan mundur hingga 20 (dua puluh) hari kerja pada awal bulan. Selain itu di SDN 002 Bontang Selatan Kota Bontang masih terdapat siswa-siswi yang dikategorikan tidak mampu tetapi tidak terdaftar sebagai siswa-siswi penerima dana BOS, seharusnya siswa-siswi yang dikategorikan tidak mampu wajib menerima dana BOS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian di SDN 002 Bontang Selatan Kota Bontang masih ada ketidaksesuaian di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan yang ada dilapangan, yaitu masih banyak buku yang ada di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tetapi tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Dari permasalahan-permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan program dana BOS di SDN 002 Bontang Selatan Kota Bontang. Dengan judul penelitian: "Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2013-2014 Pada Sekolah Dasar Negeri 002 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 002 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi media pengembangan bagi diri penulis dalam rangka menerapkan ilmu, yaitu ilmu administrasi negara yang penulis dapat dibangku kuliah.
2. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksana pelayanan administrasi bidang akademik Fisip Unmul serta sebagai bahan informasi bagi peneliti untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Menurut Chilcote (2003 : 21) Teori (*theory*) meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran, teori diharapkan memberikan petunjuk. Dalam bentuknya yang sederhana, teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematis. Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Sedangkan konsep menurut Chilcote (2003:23) adalah pengertian-pengertian dasar atau definisi-definisi rinci dari setiap kata atau kalimat yang digunakan dalam telaah ilmiah. Konsep juga bisa didefinisikan sebagai gagasan atau pemikiran yang diekspresikan dalam berbagai cara.

Pengertian Kebijakan Publik

Interprestasi dari kebijakan menurut Dye (dalam Indiahono, 2009 : 17) harus dimaknai dengan dua hal penting; Pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli. bahwa kebijakan publik adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Friedrich, dalam Wibawa, 2011 : 2).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public police process*) sekaligus studi yang sangat *crusial*.

Menurut Widodo (2010 : 85) implementasi kebijakan publik bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2012 : 147).

Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2003 : 22) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Adapun rumusan tahap pembuatan kebijakan menurut Dunn (2003 : 25) adalah sebagai berikut :

a. Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancangpeluang-peluang kebijakan yang baru.

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam dalam tahap tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang plausible, potensial, dan secara normative bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang disulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan posisi) dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa

mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat agenda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Pemantauan

Pemantauan (*monitoring*) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Edward III mengajukan empat faktor atau variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010 : 96) empat faktor tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. Model implementasi Grindle

Selain model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III terdapat juga model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Keberhasilan implemementasi menurut Grindle (dalam Subarsono,2008 : 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat.
- d. Apakah letak suatu program sudah tepat.
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :
- Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para *actor* yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - Karakteristik intuisi dan rezim yang sedang berkuasa.
 - Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Pendidikan

Pendidikan menurut Langeveld (dalam Hasbullah, 2005:2) ialah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Kemudian Marimba (dalam Hasbullah, 2005:3) menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 tertulis Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Pengertian BOS (KEMENDIKBUD 2012:2) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOS (KEMENDIKBUD 2012:2) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Sasaran program BOS (KEMENDIKBUD 2012:2-3) adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Definisi Konsepsional

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan suatu definisi konsepsional agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini bahwa “Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2013-2014 Pada Sekolah Dasar Negeri 002 Di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang” adalah Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 002 guna meningkatkan mutu pendidikan dan berkualitas dan memiliki daya saing di Kota Bontang khususnya di Kecamatan Bontang Selatan yang meliputi, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. menurut Moleong (2011 : 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti yaitu, “Kualitas Pelayanan Administrasi Bidang Akademik Pada Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman”.

Fokus Penelitian

Penentuan fokus pada suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk (Moleong, 2001:237). Adapun fokus-fokus yang dilaksanakan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Tahun Ajaran 2013-2014 Pada Sekolah Dasar Negeri 002 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, maka peneliti akan menggunakan fokus penelitian sesuai dengan yang Edward III (dalam Widodo, 2010 : 104) yaitu:
 - a. Faktor komunikasi
 - b. Sumber daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur birokrasi
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 002 Bontang Selatan Kota Bontang.

Sumber dan Jenis Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Sekolah serta yang menjadi informan lain yaitu:

1. Bendahara BOS
2. Orang tua murid

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali, mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori dan konsep yang keabsahannya sudah terjamin.

2. Penelitian Kelapangan (*Field Work Research*)

Pengumpulan data, informasi dan bahan secara langsung ke lapangan lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data di lapangan antara lain yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), antara lain:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan/atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi–materi empiris lainnya. Melalui kondensasi data, kita membuat data lebih kuat.

2. Penyajian Data

Menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan atau pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Meliputi makna yang disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan pola penjelasan secara logis dan metodologi, konfigurasi yang memungkinkan prediksi hubungan sebab akibat melalui hukum empiris. Sehingga data dapat diuji alasan atau keterpercayaannya, kekuatannya, dan *confirmability* validitasnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum objek penelitian

Sekolah Dasar Negeri 002 Bontang Selatan Kota Bontang merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana lokasi Sekolah Dasar Negeri 002 Bontang Selatan bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Yang dikepalai oleh Mantalena Samosir, S.Pd sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Bontang Selatan Kota Bontang.

Hasil Penelitian

Faktor Komunikasi

Faktor Komunikasi adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor komunikasi dana BOS khususnya di Sekolah Dasar Negeri 002 Bontang Selatan Kota Bontang terlaksananya seluruh RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah) terbukti terlaksana dengan baik serta menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah terutama bagi murid yang kurang mampu.

Sumber Daya

Sumber daya adalah pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber daya juga meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan kewenangan. Dari wawancara yang telah dilakukan maka dapat dilihat bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS adalah semua guru, pengawas, dan komite sekolah yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan program BOS. Sehingga program dapat diawasi dan dievaluasi bersama. Adapun SDM dan fasilitas dalam pelaksanaan program BOS masih dibutuhkan proses karena tenaga pendidik menginginkan semua SDM merata pada murid-murid. Dan didalam bidang akademik masih dibutuhkan waktu, sedangkan untuk bidang non akademiknya seperti ekstrakurikuler dalam bidang olahraga sudah mengalami kemajuan dari provinsi sampai internasional.

Disposisi

Disposisi adalah kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. *Jaminan Pelayanan (Assurance)* Mencakup perilaku pegawai/staf akademik dalam melakukan pelayanan yang terbaik yang dilihat dari perilaku keramahan dan sopan santun serta ketepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa proses pelaksanaan bos sudah berjalan dengan baik seperti terselenggaranya ekstrakurikuler di sekolahan. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih ada yang mengeluhkan tentang proses pencairan dana BOS, seperti kurangnya sosialisasi atau informasi yang diterima orang tua murid apakah dana BOS dicairkan berupa barang ataupun dana. Karena terdapat perubahan sewaktu-waktu yang dilakukan pihak pelaksana dana BOS.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan yang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Dari wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa sudah ada pembagian tugas dan wewenang dalam melaksanakan program bos, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menjalankan program bos sesuai dengan tujuan program itu sendiri.

Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 002 Di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penerapan prinsip Good Untuk mengetahui lebih lanjut hasil penelitian yang diperoleh, ditemukan beberapa faktor penghambat implementasi program bantuan sekolah (BOS) pada sekolah dasar negeri 002 di kecamatan bontang selatan kota bontang yang diantaranya adalah Sarana dan Prasarana, Jika menganalisis sarana dan prasarana dalam implementasi program bantuan sekolah (BOS), maka dapat dikatakan bahwa fasilitas yang ada masih belum memenuhi untuk kelancaran program BOS. Seperti: belum tersedianya LCD pada tiap kelas, belum lengkapnya buku bacaan yang disediakan oleh sekolah dan lain-lain.

Pembahasan

Faktor Komunikasi

mengacu pada model implementasi Edward III untuk melaksanakan suatu program kebijakan harus didukung dengan adanya faktor komunikasi yang harus dijalankan. Hal tersebut sudah terlaksana dengan baik dalam implementasi program bantuan sekolah (BOS) pada sekolah dasar negeri 002 di kecamatan bontang selatan kota bontang. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor komunikasi yang diselenggarakan dalam implementasi program BOS sudah cukup baik dalam pelaksanaannya.

Sumber Daya

Berdasarkan model implementasi Edward III menyatakan bahwa sumber daya yang memenuhi akan menghasilkan keberhasilan sebuah program kebijakan. Maka dapat dikatakan sumber daya yang ada pada SDN 002 di kecamatan bontang selatan kota bontang sudah cukup baik, hanya saja butuh proses untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di SDN 002 di kecamatan bontang selatan kota bontang.

Disposisi

KEPMENPAN No. 58 tahun 2002 yang dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang menjelaskan kepastian waktu pelayanan, yaitu apakah variabel waktu pelaksanaan pelayanan telah sesuai dengan jadwal pelayanan yang ada. Namun pada kenyataan dilapangan, masih ada staf akademik yang kurang disiplin waktu, seperti telat saat jam masuk kerja maupun terlambat saat setelah jam istirahat sesuai dengan jam pelayanan yang telah ditetapkan oleh pegawai akademik.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada key informan dan informan, penulis menganalisa bahwa struktur birokrasi yang ada dalam implementasi program BOS di SDN 002 kecamatan bontang selatan kota

bontang sudah cukup baik, karena terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan dana BOS. Sehingga tujuan dari implementasi program BOS di SDN 002 dapat terselenggara dengan baik.

Berdasarkan model implementasi Edward III untuk menjalankan sebuah program kebijakan harus ada struktur birokrasi yang jelas dalam sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan struktur birokrasi yang ada dalam implementasi program BOS di SDN 002 sudah berjalan dengan baik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 002 Di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang dilihat dari indikator faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Sesuai dengan tujuan dan prinsip pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah walaupun dalam prosesnya masih terdapat kekurangan dan hal-hal penghambat yang tidak begitu signifikan yaitu mekanisme proses pencairan dan disposisi yang mendapat keluhan dari pihak penerima dana BOS terutama keterbukaan informasi pencairan dana BOS yang berupa uang maupun barang dirasakan masih kurang maksimal kepada pihak penerima.
2. Adapun yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 002 Di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang antara lain adalah masih kurangnya sarana dan prasarana di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang dimana salah satu alokasi dana dari program BOS adalah untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, ditambah dengan ketidakpastian waktu dan besaran dana BOS yang diberikan pada pihak sekolah.

Saran

Dari hasil kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana di SDN 002 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sekiranya dapat dioptimalkan melalui dana BOS yang diterima oleh sekolah tersebut. Seperti: kurangnya buku bacaan di perpustakaan, tidak tersedianya tempat parkir sehingga lapangan sekolah dijadikan tempat parkir. Dengan demikian diharapkan dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat difokuskan untuk membangun fasilitas yang belum tersedia atau belum optimal.
2. Tim manajemen BOS tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebaiknya melakukan penyaluran dana BOS ke sekolah agar lebih cepat yaitu dibulan pertama dari setiap tiga bulan yang sudah tercantum dalam buku panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah.

Daftar Pustaka

- Chilcote, Ronald. 1995. *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 2007. *Evaluasi Pendidikan*. Renika Cipta. Jakarta.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Eko Susilo Madya Kasihadi. 1993. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Effahan Publishing Semarang. Semarang.
- Fattah, Nanang. 1997. *Landasan Manajemen Pendidikan Remaja*. Rosadi Karya Bandung. Bandung.
- Hasbullah, 2005. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Edisi Revisi, Rajawali pers. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2010. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, Metthw B, A Michael Huberman and Johnny Saldana 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, inc.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- No Name. 2004. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1*. Jakarta: PT. Delta Pamingkas.
- Nugroho. Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Pidarta, Made., 2007. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kadir, Abdul., dkk., 2012. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sagala, Syaiful., 2006. *Konsep Dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Yusup Faridah, Tayibnaps. 2000. *Evaluasi Program*. PT. Renika Cipta. Jakarta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- _____. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.
- Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 SDN 002 Bontang Selatan Kota Bontang.